

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Penelitian

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang bertujuan mendorong kemandirian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah pengembangan desa wisata. Menurut Hadiwijoyo (2012:45), desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang menawarkan atmosfer autentik, baik dari aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun aktivitas khas desa, yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata.

Pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan sektor pariwisata, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas ekonomi, peningkatan partisipasi sosial, serta pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan strategi penting dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan adalah mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antarwilayah serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam

proses pembangunan masih menjadi permasalahan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya berjalan secara optimal (Syafei, 2001:69).

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai pemberian bantuan ekonomi, melainkan sebagai upaya peningkatan kapasitas, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Menurut Suharto (2005:59), pemberdayaan memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai proses dan sebagai tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan kapasitas serta memperkuat posisi individu maupun kelompok masyarakat yang rentan, terutama mereka yang berada dalam kondisi kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah pada kondisi ideal, yaitu terciptanya masyarakat yang mandiri, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peran pemerintah menjadi faktor yang sangat penting melalui perumusan dan implementasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat serta berorientasi pada pengurangan kemiskinan (Sodiq, 2014:15). Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur dan pelindung, tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif.

Salah satu sektor yang dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa adalah sektor pariwisata.

Melalui pengembangan desa wisata, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan potensi lokal secara mandiri. Pendekatan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Upaya pengembangan desa wisata di Indonesia semakin diperkuat melalui berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata.

Desa wisata berpotensi menjadi sarana strategis dalam memperkuat perekonomian lokal dengan menyediakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Selain manfaat ekonomi, pengembangan desa wisata juga membawa dampak positif terhadap aspek sosial dan lingkungan, karena mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam serta mempertahankan keasrian kawasan sebagai daya tarik utama. Dengan demikian, desa wisata tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*'adl*), serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan desa wisata perlu dikelola melalui

prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti kerja sama (*syirkah*), bagi hasil, dan pemberdayaan masyarakat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pihak yang terlibat.

Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi yang besar dalam pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara geografis, desa ini berada pada jalur strategis yang menghubungkan kawasan wisata utama Pangalengan dan Ciwidey, sehingga memiliki mobilitas dan aksesibilitas yang baik bagi wisatawan. Kondisi ini diperkuat oleh karakteristik fisik wilayah yang didominasi oleh bentang lahan pertanian, aliran Sungai Ciherang, serta saluran irigasi Hantap yang memiliki nilai estetika dan rekreatif.

Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat desa menunjukkan bahwa Desa Kiangroke memiliki berbagai daya tarik wisata yang mulai berkembang dan mendapat antusiasme tinggi dari wisatawan. Beberapa destinasi seperti Kereta Sawah Dangdeur Van Java, Saluran Irigasi Ciherang, area pemancingan, Warung Kopi Pambinihin, serta pasar UMKM mingguan yang berlangsung setiap hari Minggu di sepanjang Jalan Ciherang, menjadi indikator bahwa potensi wisata tersebut telah dimanfaatkan secara bertahap oleh masyarakat. Keberadaan destinasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menerima pengembangan pariwisata, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan dan mengelola daya tarik wisata di tingkat desa (Arie Dachlan M., Sekretaris Desa Kiangroke, 27 Oktober 2025).

Selain potensi lingkungan dan daya tarik wisata yang telah terbentuk, kondisi sosial masyarakat turut mendukung pengembangan desa wisata. Berdasarkan data desa, sebagian besar masyarakat berada pada usia produktif dengan tingkat pendidikan menengah serta telah mengikuti beberapa bentuk pelatihan yang berkaitan dengan kewirausahaan, pengolahan makanan, dan pelayanan wisata. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kiangroke memiliki kemampuan dasar yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi berbasis wisata. Nilai sosial seperti gotong royong, kebiasaan kerja sama, serta hubungan yang erat antara warga dan pemerintah desa menjadi modal sosial penting yang memperkuat keberlanjutan pengembangan desa wisata. Kolaborasi yang telah terbangun antara masyarakat, Pokdarwis, dan pemerintah desa juga menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mengembangkan Kiangroke sebagai desa wisata yang kompetitif.

Secara kelembagaan, Pemerintah Desa Kiangroke telah menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu fokus pembangunan melalui kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2019–2025. Kebijakan ini tidak hanya mengarahkan pengembangan desa wisata dari sisi fisik dan destinasi, tetapi juga menekankan pentingnya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Selain itu, penetapan Desa Kiangroke sebagai salah satu dari sepuluh calon desa wisata Kabupaten Bandung memperkuat urgensi dilakukannya inovasi pengembangan wisata yang terstruktur, adaptif, dan berbasis kebutuhan

masyarakat. Kebijakan ini juga memberikan dukungan formal bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan wisata yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Melihat kondisi tersebut, pengembangan desa wisata di Kiangroke memerlukan strategi yang bukan hanya memperhatikan aspek destinasi, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama. Pada konteks ini, strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal menjadi sangat relevan. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat memiliki aset, potensi, dan kapasitas yang dapat dikembangkan sebagai modal pembangunan. Pemanfaatan potensi lokal seperti kemampuan masyarakat dalam bertani, keterampilan kuliner, kreativitas generasi muda, serta kekayaan alam yang dimiliki desa menjadi landasan utama bagi pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Pendekatan berbasis potensi lokal memberikan keunggulan dibandingkan pendekatan berbasis kebutuhan (*needs-based approach*). Pendekatan yang berfokus pada kekurangan masyarakat sering kali memunculkan ketergantungan terhadap bantuan luar, membutuhkan modal besar, atau tidak sejalan dengan kapasitas masyarakat setempat. Sebaliknya, pendekatan berbasis potensi lokal memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan apa yang telah mereka miliki, sehingga proses pengembangan menjadi lebih cepat, realistis, dan dapat dijalankan tanpa hambatan struktural yang besar. Melalui strategi ini, masyarakat dapat mengelola aset alam sebagai destinasi wisata, memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk membuka

usaha kuliner atau jasa wisata, serta mengembangkan jejaring ekonomi melalui pasar UMKM dan kegiatan wisata lainnya.

Urgensi penggunaan strategi pemberdayaan berbasis potensi lokal dalam pengembangan desa wisata Kiangroke terletak pada kemampuannya menghasilkan perubahan ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat. Melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan destinasi wisata, masyarakat memperoleh peluang kerja baru, diversifikasi sumber pendapatan, serta peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Selain itu, strategi ini juga memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek yang menerima manfaat. Dengan demikian, pemberdayaan berbasis potensi lokal menjadi instrumen yang memungkinkan pengembangan desa wisata berjalan secara inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa pengembangan desa wisata di Kiangroke memerlukan strategi pemberdayaan yang tidak hanya mampu mengoptimalkan kekuatan internal masyarakat, tetapi juga memanfaatkan kondisi lokal secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa potensi yang telah ada perlu diarahkan melalui pendekatan pemberdayaan yang tepat agar mampu memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dalam pengembangan Desa Wisata Kiangroke menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana potensi lokal dapat dimobilisasi, bagaimana tingkat

keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan, serta bagaimana strategi tersebut dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat perlunya model pemberdayaan yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Pengembangan desa wisata tidak hanya menuntut inovasi pada aspek daya tarik wisata, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang mampu memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu menjadi pelaku utama pembangunan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong kemandirian serta menciptakan manfaat ekonomi jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan urgensi tersebut, peneliti menetapkan judul penelitian “Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Pengembangan Desa Wisata (*Asset Based Community Development* di Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung).”

1. 2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal melalui pengembangan Desa Wisata di Desa Kiangroke dengan menggunakan teori pemberdayaan Edi Suharto (2005) sebagai landasan analisis. Kajian ini menitikberatkan pada analisis penguatan individu (*people-centered empowerment*) dan penguatan struktural (*structural empowerment*), serta mengkaji hasil dan dampak penerapan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD) terhadap peningkatan kesejahteraan

dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Kiangroke.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian untuk memperjelas arah kajian dan analisis penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun guna mengarahkan peneliti dalam memahami secara mendalam bagaimana strategi, dan hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kiangroke.

1. Bagaimana penguatan individu diterapkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata di Desa Kiangroke?
2. Bagaimana penguatan struktural dilakukan untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Kiangroke?
3. Bagaimana hasil dan dampak dari penerapan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) terhadap peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Kiangroke?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penguatan individu yang diterapkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata di Desa Kiangroke.

2. Menganalisis penguatan struktural yang dilakukan untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Kiangroke.
3. Menganalisis hasil dan dampak dari penerapan metode *Asset Based Community Development* (ABCD) terhadap peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Desa Kiangroke.

1. 4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dalam pembangunan masyarakat pedesaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Kiangroke sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Bagi masyarakat Desa Kiangroke, penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal

serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya desa secara mandiri. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian dalam penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat, pengembangan desa wisata, dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

1. 5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Edi Suharto. Suharto (2005) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses peningkatan kemampuan individu dan kelompok agar mampu mengakses sumber daya, mengendalikan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan struktural, seperti akses terhadap informasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta kemandirian dalam pengelolaan sumber daya.

Lebih lanjut, Suharto (2005) membagi strategi pemberdayaan ke dalam dua pendekatan utama, yaitu *people-centered empowerment* (penguatan individu) dan *structural empowerment* (penguatan struktural). Pendekatan penguatan individu menekankan peningkatan kapasitas personal masyarakat, seperti keterampilan, kepercayaan diri, dan kemampuan manajerial. Sementara itu, penguatan struktural berfokus pada perubahan sistem sosial, kelembagaan, serta kebijakan publik agar masyarakat memperoleh akses yang lebih adil terhadap sumber daya. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan

menjadi landasan penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Kiangroke agar mampu tumbuh secara mandiri dan berdaya saing.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pengembangan desa wisata, pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) menjadi sangat relevan. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Kretzmann dan McKnight (1993:5) melalui karya *Building Communities from the Inside Out*, yang menekankan pembangunan berbasis kekuatan (aset) masyarakat, bukan pada kekurangan yang dimiliki. ABCD menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan dengan mengoptimalkan potensi, sumber daya, dan keterampilan lokal.

Mathie dan Cunningham (2003:474) menyatakan bahwa pendekatan ABCD mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi aset yang telah tersedia, membangun jaringan sosial, serta memperkuat kapasitas lokal dalam proses pembangunan. Sementara itu, Green dan Haines (2015:38) menegaskan bahwa pembangunan berbasis aset mampu menciptakan keberlanjutan karena bertumpu pada kekuatan internal masyarakat, bukan ketergantungan pada bantuan eksternal. Dengan demikian, pendekatan ABCD sejalan dengan teori pemberdayaan Edi Suharto karena sama-sama menekankan penguatan individu dan struktur sosial sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

1. 6 Langkah-langkah Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kiangroke memiliki potensi lokal yang beragam, meliputi aspek sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan budaya, yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*).

1.6.2 Paradigma dan Pendekatan

Paradigma merupakan kerangka konseptual yang menjadi landasan berpikir peneliti dalam memahami suatu fenomena penelitian. Paradigma memuat seperangkat asumsi, keyakinan, dan metode yang memengaruhi cara pandang peneliti terhadap realitas sosial serta proses pengumpulan dan interpretasi data.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif yang berorientasi pada pemahaman makna, nilai, serta budaya yang hidup dalam masyarakat (Rahardjo, 2018:34). Paradigma ini memandang realitas sosial sebagai konstruksi yang dibentuk melalui pengalaman subjektif individu maupun kelompok. Oleh karena itu, paradigma interpretatif digunakan untuk menggali dan memahami bagaimana masyarakat Desa Kiangroke memaknai proses pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal melalui

pengembangan desa wisata, termasuk persepsi, pengalaman, serta praktik sosial yang mereka jalani dalam proses tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku subjek penelitian (Iskandar, 2009:11).

1.6.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann. *Asset-Based Community Development* (ABCD) merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pemanfaatan dan pengembangan aset yang telah dimiliki oleh masyarakat. Dalam perspektif ABCD, aset dipahami sebagai segala bentuk potensi yang dapat menjadi kekuatan pendorong perubahan, baik berupa sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), jaringan sosial yang terbentuk dalam kehidupan masyarakat, maupun aset fisik yang tersedia di desa.

John McKnight dan Jody Kretzmann (1993), sebagai pendiri *The Asset-Based Community Development Institute*, mengemukakan sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penerapan metode ABCD. Metode ini menekankan bahwa setiap individu dan komunitas memiliki kapasitas serta potensi yang dapat dikonstruksikan secara signifikan terhadap pengembangan diri dan lingkungannya. Oleh karena itu, metode

ABCD berfokus pada penguatan aset dan kekuatan yang telah ada dalam komunitas.

Salah satu strategi utama dalam ABCD adalah mendorong masyarakat untuk berdialog, menggali pengalaman positif, serta merumuskan visi masa depan yang lebih optimistis berdasarkan kekuatan kolektif yang telah ada. Dengan demikian, aset atau potensi yang tersebar di masyarakat dapat dipetakan secara lebih sistematis dan komprehensif.

Pendekatan ini sering dianalogikan seperti melihat gelas yang setengah terisi (*Half Full Half Empty*). Fokusnya bukan pada kekosongan atau keterbatasan, melainkan pada bagian yang sudah terisi dan dapat dikembangkan lebih jauh. Melalui cara pandang tersebut, pendekatan ABCD mampu membangun rasa percaya diri masyarakat serta memperkuat kapasitas mereka dalam menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data yang berupa penjelasan, narasi, dan keterangan mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti. Data yang dikumpulkan difokuskan pada informasi yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal melalui pengembangan Desa Wisata Kiangroke.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup data mengenai strategi penguatan individu, seperti bagaimana masyarakat mengembangkan kapasitas dan keterampilannya dalam kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal; strategi penguatan struktural, yang mencerminkan peran pemerintah desa, Pokdarwis, dan lembaga terkait dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat; serta hasil dan dampak penerapan strategi pemberdayaan berbasis pendekatan *Asset-Based Community Development (ABCD)* terhadap kesejahteraan dan partisipasi masyarakat di Desa Kiangroke.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, yang keduanya digunakan untuk memperoleh informasi relevan dalam menjawab fokus dan pertanyaan penelitian.

1. Data Primer

Data primer akan diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kiangroke. Sumber data primer meliputi pemerintah Desa Kiangroke, yang memberikan informasi mengenai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal; Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pengelola Desa Wisata Kiangroke, yang memberikan data terkait strategi dan implementasi pengembangan desa wisata, serta masyarakat pelaku usaha lokal yang menjadi penerima manfaat dari kegiatan

pemberdayaan ekonomi. Data primer ini diperlukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana strategi pemberdayaan dilaksanakan, baik melalui penguatan individu maupun penguatan struktural di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai penunjang dan penguat temuan dari data primer. Data ini akan diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Bandung, yang memberikan informasi mengenai arah kebijakan dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah Kabupaten Bandung, termasuk Desa Kiangroke. Selain itu, Pemerintah Desa Kiangroke juga menjadi sumber data sekunder melalui berbagai dokumen seperti profil desa, data monografi, laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan arsip pembentukan Desa Wisata Kiangroke. Data sekunder lainnya berasal dari instansi di tingkat kecamatan dan kabupaten yang memiliki catatan kegiatan terkait pembinaan dan pengembangan potensi lokal masyarakat. Melalui data sekunder ini, peneliti dapat memahami konteks kebijakan, sejarah, serta kondisi faktual yang melatarbelakangi proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kiangroke.

1.6.5 Penentuan Informan dan Unit Penelitian

a. Informan dan Unit Analisis

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berperan langsung dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Wisata Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Informan tersebut meliputi aparat pemerintah desa, pengelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha lokal, serta masyarakat yang memahami pelaksanaan strategi pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Kabupaten Bandung turut dilibatkan sebagai informan pendukung untuk memperoleh data terkait kebijakan dan program pengembangan desa wisata di tingkat daerah.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Pemilihan desa ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Kiangroke memiliki potensi lokal berupa sumber daya alam dan sosial yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*). Potensi tersebut meliputi lahan pertanian, aliran Sungai Ciherang, dan saluran irigasi Hantap yang berperan dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada analisis pemanfaatan potensi lokal tersebut sebagai aset dalam strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat serta kontribusinya terhadap kemandirian ekonomi dan keberlanjutan Desa Wisata Kiangroke.

b. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pemahaman dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Afifuddin dan Ahmad Saebani (2008:66), teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam dari sumber yang benar-benar memahami konteks penelitian.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2010:145). Observasi dilakukan secara langsung di Desa Kiangroke untuk mengamati strategi penguatan individu dan struktural dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta dampak pengembangan Desa Wisata Kiangroke terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui observasi ini, peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai dinamika pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai suatu fenomena (Sugiyono, 2015:72). Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang terlibat langsung dalam proses

pemberdayaan, meliputi pemerintah desa, pengelola Pokdarwis, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta perwakilan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait strategi pemberdayaan, dukungan kelembagaan, serta dampak pengembangan desa wisata terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) digunakan untuk memperoleh pemahaman kolektif mengenai isu pemberdayaan melalui diskusi terarah yang melibatkan beberapa partisipan. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data dari hasil interaksi sosial antar informan, sehingga dapat memperkaya dan menguatkan temuan penelitian terkait pengembangan Desa Wisata Kiangroke.

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan dokumen tertulis, gambar, dan arsip yang relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2020). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data hasil observasi dan wawancara, yang diperoleh dari profil desa, data monografi, laporan kegiatan pemberdayaan, arsip pengembangan

Desa Wisata Kiangroke, serta dokumen kebijakan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung.

1.6.7 Teknik Penentuan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk saling memverifikasi hasil penelitian (Sugiyono, 2015:83).

Penerapan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian dengan membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

1.6.8 Teknis Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses sistematis untuk mengorganisasi, menafsirkan, dan memahami data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, *focus group discussion* dan dokumentasi. Analisis data bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam penerapan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal melalui pengembangan Desa Wisata Kiangroke dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu strategi penguatan individu, strategi penguatan struktural, serta hasil dan dampak pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk menampilkan pola dan hubungan antar komponen strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan interpretasi data yang telah diverifikasi dengan bukti empiris, sehingga mencerminkan kondisi nyata penerapan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal melalui pendekatan ABCD di Desa Wisata Kiangroke.